

PENDIDIKAN ISLAM DI MALAYSIA

Zaitun

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau

Abstract

Islamic Education in Malaysia : *Malaysia is one of the Southeast Asian countries that adhere to the parliamentary system. Where the power is held by the prime minister. As a country that makes Islam as the official religion, it was obvious that government intervention in the survival of Islam in Malaysia is quite advanced and rapidly recognized. Many Islamic educational institutions are nurtured well, including the most attention from the government.*

Keywords: Malaysia, Southeast Asian, Islamic education.

Pendahuluan

Proses islamisasi di Asia Tenggara, belum ada kesepakatan para ahli dalam menentukan tolak ukur yang digunakan untuk melihat sejauh mana tingkat penetrasi Islam pada masa awal di kalangan masyarakat pribumi. Perbedaan-perbedaan yang ada selain disebabkan perbedaan kategori yang digunakan dalam melihat sosok Islam itu, juga berkaitan dengan perbedaan dalam memahami apa yang dimaksud dengan Islam. Sebagian ahli melihat tingkat penetrasi islamisasi berdasarkan kriteria minimal formal keagamaan, semacam pengucapan dua kalimat syahadah, penggunaan nama muslim atau pemakaian aksara Arab pada batu nisan atau pada pengambilan beberapa kata atau istilah.

Selain itu ada juga yang membedakan antara kedatangan Islam dan islamisasi. Kedatangan Islam biasanya dibuktikan dengan melihat peninggalan sejarah seperti prasasti, batu bertulis, batu nisan dan lain-lain. Kedatangan Islam di suatu tempat tidak selalu berarti bahwa masyarakat setempat telah menganut Islam. Konversi Islam suatu masyarakat seringkali berselang waktu 1 sampai 2 abad dengan

kedatangan Islam itu sendiri. Sedangkan islamisasi merupakan proses panjang yang berlangsung selama berabad-abad bahkan sampai sekarang yang selain mengandung arti mengajak untuk memeluk Islam juga mengandung arti upaya pemurnian Islam dari unsur-unsur kepercayaan non Islam serta berusaha agar Islam dilaksanakan dalam berbagai aspek kehidupan.

Islam tiba di Asia Tenggara melalui proses damai yang berlangsung berabad-abad, masuk melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah dan pembauran masyarakat muslim Arab, Persia dan India dengan masyarakat pribumi. Salah satu negara yang berada pada wilayah Asia Tenggara adalah Malaysia. Tidak ada dokumen yang lengkap mengenai kedatangan Islam di Malaysia. Sehingga menyebabkan munculnya berbagai teori tentang kapan dan dari mana Islam pertama kali menyebar. Azmi misalnya, berpendapat bahwa Islam datang pertama kali ke Malaysia sejak abad pertama Hijrah. Pendapat ini berpegang bahwa pertengahan abad tersebut, orang Islam sudah sampai ke Gugusan Kepulauan Melayu dan bersamaan dengan itu mereka menyampaikan dakwah.¹

Pendapat lain dikemukakan oleh Fatimi, bahwa Islam datang pertama kali pada abad ke 8 H (14 M). Ia berpegang pada penemuan batu bersurat di Trengganu yang tertanggal 702 H (1302 M).² Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa didasarkan pada penemuan batu nisan di Tanjung Inggis, Kedah pada tahun 1965. Pada batu nisan itu tertulis nama Syeikh Abd al-Qodir ibn Husayn Shah yang meninggal pada tahun 291 H (940 M). Menurut sejarawan, Syeikh Abd al-Qodir adalah seorang da'i keturunan Persia. Penemuan ini

¹ Wan Hussein Azmi, *Islam di Malaysia: Kedatangan dan perkembangan* (abad 7-20 M), dalam Azizan bin Abdul Razak, *Tamadun Islam di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia, 1980), hlm. 142

² S.Q. Fatimi, *Islam Come to Malaysia*, (Singapore: Sociology Research Institute, 1963), hlm. 39

merupakan suatu bukti bahwa Islam telah datang ke Malaysia pada abad ke 3 H (10 M).³

Perkembangan Islam di Malaysia

Malaysia adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah persekutuan di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi. Ibukotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan persekutuan. Jumlah penduduk negara ini melebihi 27 juta jiwa. Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan Malaysia Barat dan Malaysia Timur oleh Kepulauan Natuna, wilayah Indonesia di Laut Cina Selatan. Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei dan Filipina. Negara ini terletak di dekat khatulistiwa dan beriklim tropika. Kepala negara Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Model pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster.

Malaysia, penduduknya terdiri dari berbagai etnis, seperti Melayu 50 %, bumi putera 10.6 % , Cina 7,9 % , dan India 3,4 %. Sedangkan agama masyarakat Malaysia, terdiri dari Islam 58,6 %, penganut Budha 18,4 %, Kristen 6,4 % dan Hindu 5,3 %. Namun sebagai negara yang multirasial, komunikasi dengan bahasa lain seperti bahasa Inggris lazim digunakan sehari-hari. Bahkan sekolah-sekolah di Malaysia mewajibkan masuknya mata pelajaran bahasa Inggris.⁴ Malaysia sebagai negara persekutuan tidak pernah ada sampai tahun 1963. Sebelumnya, sekumpulan koloni didirikan oleh Britania Raya pada akhir abad ke-18, dan paro barat Malaysia modern terdiri dari beberapa kerajaan yang terpisah-pisah. Kumpulan wilayah jajahan itu dikenal sebagai Malaya Britania hingga pembubarannya pada 1946, ketika kumpulan itu disusun kembali sebagai Uni Malaya. Karena

semakin meluasnya tentangan, kumpulan itu lagi-lagi disusun kembali sebagai Federasi Malaya pada tahun 1948 dan kemudian meraih kemerdekaan pada 31 Agustus 1957. Singapura, Sarawak, Borneo Utara, dan Federasi Malaya bergabung membentuk Malaysia pada 16 September 1963. Tahun-tahun permulaan persekutuan baru diganggu oleh konflik militer dengan Indonesia dan keluarnya Singapura pada 9 Agustus 1965. Bangsa-bangsa di Asia Tenggara mengalami ledakan ekonomi dan menjalani perkembangan yang cepat di penghujung abad ke-20. Pertumbuhan yang cepat pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an, rata-rata 8% dari tahun 1991 hingga 1997, telah mengubah Malaysia menjadi negara industri baru. Karena Malaysia adalah salah satu dari tiga negara yang menguasai Selat Malaka, perdagangan internasional berperan penting dalam ekonominya. Pada suatu ketika, Malaysia pernah menjadi penghasil timah, karet dan minyak kelapa sawit di dunia. Industri manufaktur memiliki pengaruh besar bagi ekonomi negara ini. Malaysia juga dipandang sebagai salah satu dari 18 negara berkeanekaragaman hayati terbesar di dunia. Suku Melayu menjadi bagian terbesar dari populasi Malaysia. Terdapat pula komunitas Tionghoa-Malaysia dan India-Malaysia yang cukup besar. Bahasa Melayu dan Islam masing-masing menjadi bahasa dan agama resmi negara. Malaysia adalah anggota perintis ASEAN dan turut serta di berbagai organisasi internasional, seperti PBB. Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia juga menjadi anggota Negara-Negara Persemakmuran.

Nuansa Islam di Malaysia lebih kuat dibandingkan dengan negara yang penduduknya lebih banyak beragama Islam. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang telah memperkuat pengaruh Islam dalam berbagai fase sejarah Malaysia. Sejak periode awal di Malaysia, Islam telah mempunyai ikatan yang erat dengan politik dan masyarakat melayu. Islam bagi orang Melayu, bukan hanya sebatas keyakinan, tetapi juga telah menjadi identitas mereka, dan menjadi dasar

³ Mansor Tobeng, Keramat Tok Serban Hijau di Tanjung Inggeris, Kedah', *Mastika*, Oktober 1965, hlm. 33-35

⁴ Abdul Rahman Assegaf, *Internasionalisasi Pendidikan: Sketsa perbandingan Pendidikan di Negara Islam dan Barat*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), hlm. 112

kebudayaan Melayu.⁵ Pakaian tradisional Melayu, misalnya telah disesuaikan dengan yang dianjurkan Islam. Berbaju kurung dan rok panjang bagi wanita yang disertai oleh tutup kepala dengan maksud menutup aurat. Etika berumah tangga, bertetangga dan bermasyarakat juga mengalami penyesuaian dengan ajaran Islam. Ini berarti bahwa adat, tradisi dan budaya Melayu telah diwarnai oleh ajaran Islam.

Sejak Malaysia meraih kemerdekaan pada tanggal 31 Agustus 1957, posisi keyakinan Islam semakin menonjol dalam sistem politik; Islam diakui mempunyai tempat yang khusus dalam konstitusi (UU) Malaysia yang menyebutkan bahwa "Islam adalah agama resmi negara".⁶ Pada saat yang sama, UU memberikan kebebasan beragama kepada komunitas non-Muslim. Mereka berhak menjalankan agama mereka, memiliki kekayaan, mendirikan sekolah-sekolah agama, mengurus perkara-perkara mereka sendiri. Namun mereka tidak diperbolehkan berdakwah atau menyebarkan keyakinan mereka di kalangan kaum muslim; aturan ini dimaksudkan untuk membatasi pertumbuhan dan pengaruh mereka di wilayah-wilayah lain. Meskipun orang-orang Muslim dilindungi oleh konstitusi dan hukum, hak dan kewajiban mereka dan kaum muslim Melayu tidaklah sama.

Perkembangan akhir tahun 1970-an menandai adanya arah perubahan kebijakan pemerintah UMNO terhadap Islam. Dalam hal ini, pemerintah secara jelas memperlihatkan kebijakan lebih akomodatif dan pro Islam tidak hanya bersifat infrastruktural tetapi juga struktural dan kultural. Kecendrungan ini menemukan momentumnya pada masa pemerintahan Mahathir. Pemerintah bahkan memperlihatkan sikap mendukung Islam dengan melakukan program islamisasi dan penerapan nilai-nilai Islam yang menelan biaya

⁵ Johns L. Esposito dan Fred R Von der Mehden, *Islamic Resurgence in Malaysia*, Dalam Jhon L. Esposito (ed), *Islam and Development Religion and Socio-political Change*, (Syracuse: Syracuse University Press, 1980), hlm. 164

⁶ Mohammed Suffian, Lee, H.P., and Trindade, F.A., (ed) *The Constitution of Malaysia, Its Development: 1957-1977*, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978)

yang relatif besar. Tentu saja Mahathir selaku perdana menteri punya andil besar dalam hal ini, seperti ditegaskan oleh Mutalib.⁷

Secara struktural, sikap akomodatif pemerintah antara lain dapat dilihat pada kebijakan pemerintah merekrut sejumlah aktivis Muslim untuk duduk dalam sistem pemerintahan. Sikap akomodatif juga terlihat pada peristiwa penting ketika Mahathir mengajak Anwar Ibrahim seorang tokoh Islam yang kharismatik bergabung ke dalam pemerintahan. Masuknya Anwar Ibrahim dalam pemerintahan membuat banyak pemimpin ABIM (Angkatan Belia Islam Melayu) mengikuti langkah Anwar mendukung peran Islam dalam pemerintahan negara dan masyarakat. Beberapa pemimpin ABIM melibatkan diri pada institusi-institusi seperti IIUM (International Islamic University Malaysia), Bank Islam dan sebagainya.

Selain itu, para sultan menikmati kedudukan istimewa, dimana para sultan diberi wewenang dan kepercayaan sebagai pemimpin agama di negara bagian mereka masing-masing. Sultan dipercaya sebagai pembela iman, pelindung hukum Islam, pendidikan, dan kebudayaan Melayu. Oleh karena itu, sultan berhak menjalankan kewajiban-kewajiban moral dan agama. Pengakuan negara atas Islam sebagai agama resmi negara turut mendukung menguatnya Islam di Malaysia, karena pengakuan itu berarti bahwa negara turut membantu pelaksanaan ajaran Islam dan memperhatikan kepentingan umat Islam di negara tersebut. Bukti-bukti keberpihakan pemerintah terhadap Islam. Pemerintah menetapkan pengetahuan agama Islam sebagai materi di tingkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) pada tahun 1979, menetapkan secara resmi Bulan Dakwah Nasional (1979), meningkatkan Kinerja Pusat Islam yang merupakan pusat saraf dari birokrasi Islam (1984) dan lain-lain.

⁷ From the time of his elevation to the highest political office in the land in 1981, not a year has passed without the government announcing policies aimed at convincing the Malays and Muslims that the government (and UMNO) is serious in its support for the cause of Islam, lihat Husein Mutholib, *Islam and Ethnicity in Malay Politics*, hlm. 133

Secara historis, pondasi dan elemen-elemen penting bagi munculnya kesadaran Islam pada tahun-tahun belakangan di Malaysia telah ada dalam masyarakat melayu sebelumnya. Dengan kata lain, meningkatnya kesadaran Islam di Malaysia bukan tanpa benih, tetapi telah memiliki akar yang kuat sejak periode awal di Malaysia, setidaknya dari masa kesultanan Malaka.⁸ Sejak periode tersebut, Islam mempunyai ikatan erat dengan masyarakat dan politik bagi masyarakat Melayu, Islam tidak hanya sebatas keyakinan, tetapi telah menjadi unsur utama identitas dan kebudayaan mereka. Islam yang mempunyai dasar filosofis dan rasional yang kuat, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan baik sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, hukum maupun politik. Karena agama dipandang sebagai sesuatu yang tidak bisa diperlakukan secara *taken for granted*, meskipun upaya tersebut bukan sesuatu yang mudah dilakukan.

Perkembangan Pendidikan Di Malaysia

Sistem pendidikan di Malaysia merupakan “warisan” sistem pendidikan Inggris. Malaysia merupakan bekas jajahan negara Ratu Elizabeth yang setelah merdeka pada tahun 1957 menjadi anggota negara persemakmuran. Pendidikan Malaysia, sebagaimana di negara kita juga berupa sekolah negeri (sekolah yang menjadi tanggungan kerajaan) dan sekolah swasta (sekolah persendirian dalam bahasa Malaysia). Pendidikan di Malaysia dikelola oleh pejabat kementerian. Sebagaimana di Indonesia, pendidikan Malaysia terdiri dari beberapa tingkat yaitu : Prasekolah, Pendidikan rendah, Pendidikan menengah dan Pengajian tinggi.

Pemerintah Kerajaan Malaysia mewajibkan belajar untuk warganya selama 11 tahun yaitu untuk pendidikan rendah selama enam tahun dan pendidikan menengah selama lima tahun. Ada dua menteri yang mengurus pendidikan di Malaysia. Sekolah rendah dan

sekolah menengah diurus oleh kementerian pelajaran Malaysia, sedangkan pengajian tinggi diurus oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia yang didirikan pada tahun 2004. Perlu diketahui bahwa sejak tahun 2003, Malaysia menerapkan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam mata pelajaran yang berkenaan dengan Sains.

Pendidikan Pra Sekolah

Untuk tingkat pra sekolah dibentuk TASKA (Taman Asuhan Kanak-kanak) yang diperuntukkan bagi usia 2 s.d 4 tahun. Modelnya menyerupai TPA (Tempat Penitipan Anak) yang dipadukan dengan Playgroup. Taman Asuhan ini sarana dan prasarannya disediakan oleh kerajaan, sedangkan pegawainya (semacam kader) digaji oleh kerajaan. Untuk tanah disediakan oleh masyarakat setempat. Taman asuhan ini diasuh oleh satu pengasuh dibantu satu orang pembantu. Taman asuhan ini biasanya dipungut bayaran. Disini anak-anak selain dititipkan juga diasuh oleh guru dan pengasuh yang biasanya tinggal di sekitar lokasi TASKA. Semua kebutuhan makan anak-anak dipenuhi oleh TASKA, sedangkan untuk susu biasanya orang tua mereka membawa sendiri susu anak-anaknya.

Taman Kanak-kanak, di Malaysia dikenal dengan nama Sekolah Tadika. Sekolah ini menerima pendaftaran kanak-kanak usia 4 s.d 6 tahun. Sama halnya dengan Indonesia, pendidikan tadika bukan merupakan pendidikan wajib dalam pendidikan Malaysia, yang juga banyak didirikan dan dikelola oleh pihak swasta. Namun sekarang ini, sebagian besar sekolah kebangsaan (sekolah negeri) dilengkapi dengan kelas prasekolah atau tadika ini. Pendaftaran ke kelas tadika ini diutamakan untuk anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah yaitu RM 500 per bulan atau kurang (sekitar Rp 1.500.000,- , jika RM 1 setara dengan Rp. 3000,-). Di TK negeri Malaysia ini, satu kelas dibatasi maksimal 25 anak. Hal yang cukup menarik, pemerintah Malaysia menyediakan anggaran RM 100/murid/tahun, ditambah bantuan makanan RM 1,5/murid/hari.

⁸ Helmiati, *Islam dalam Masyarakat & Politik Malaysia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2007), hlm. 160

Pendidikan Rendah

Pendidikan rendah di Malaysia berlangsung selama 6 tahun, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6, dan menerima pendaftaran anak berumur 7 sampai 12 tahun. Bahasa Melayu dan bahasa Inggris merupakan mata pelajaran wajib dalam sistem pendidikan Malaysia. Sekolah rendah umum di Malaysia terbagi atas dua jenis, yaitu Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Jenis Kebangsaan. Sekolah Kebangsaan mayoritas muridnya anak melayu, sementara orang tionghoa memasukkan anaknya ke Sekolah Kebangsaan Cina, orang Tamil ke Sekolah Kebangsaan Tamil, dan seterusnya. Kurikulum di kedua jenis sekolah rendah tersebut adalah sama, yaitu mengutamakan penguasaan dasar-dasar Membaca, Menulis, Mengira (Berhitung), jadi sama dengan Indonesia dengan CA LIS TUNG nya. Perbedaan antara dua jenis sekolah ini ialah bahasa pengantar yang digunakan. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di Sekolah Kebangsaan. Bahasa Tamil atau bahasa Mandarin digunakan sebagai bahasa pengantar di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil atau Cina.

Pada akhir tahun persekolahan sekolah rendah, yaitu pada kelas 6, ujian umum diadakan untuk menilai prestasi murid-murid. Ujian umum pada tingkat sekolah rendah dinamakan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). Mata uji dalam UPSR ini meliputi Bahasa Melayu dan Inggris, Matematika dan Sains, sementara di negara kita sampai tahun ini belum memasukkan Bahasa Inggris dalam UASBN Sekolah Dasar. Murid yang telah mengikuti UPSR, lulus ataupun tidak lulus dapat melanjutkan pelajaran ke tingkat menengah. Perlu diketahui bahwa persekolahan di Malaysia tidak mengenal istilah tidak naik tingkat karena anak wajib belajar selama sebelas tahun tadi. Hanya saja dalam sistem pendidikan di Malaysia murid dikelompokkan dalam kelas-kelas sesuai dengan kemampuan akademiknya. Misalnya golongan anak paling pandai masuk ke kelas Arif, golongan peringkat ke dua masuk ke kelas Bestari, ketiga ke kelas Cerdik dan golongan kemampuan akademik paling bawah masuk ke kelas Dedikasi. Konon, ini sudah menjadi kebijakan kementerian pelajaran.

Sistem pendidikan di Malaysia disusun berdasarkan pada Sistem Pendidikan Inggris. Pendidikan rendah atau pendidikan dasar di Malaysia dimulai pada kanak-kanak usia 7 s.d 12 tahun (pendidikan dasar 6 tahun). Wajib belajar (pendidikan wajib) di Malaysia diterapkan dan dilaksanakan mulai tahun persekolahan 2003. Pendidikan wajib adalah satu peraturan yang mewajibkan setiap ibu bapak warganegara Malaysia (yang menetap di Malaysia) yang mempunyai anak mencapai umur enam tahun mendaftarkannya di sekolah rendah (pendaftaran murid biasanya dilakukan 1 tahun sebelum masa persekolahan). Kegagalan ibu bapak memastikan anaknya mengikuti pendidikan wajib merupakan satu kesalahan dari segi undang-undang, dan jika terbukti di pengadilan, ibu bapak berkenaan akan dikenakan denda maksimal RM 5000 atau dipenjarakan maksimal 6 bulan atau kedua-duanya sekali.

Ada peraturan yang mewajibkan, ada pula sangsi bagi yang melanggar. Namun negara juga mendukung sepenuhnya pembangunan di bidang pendidikan. Fasilitas, sarana dan prasarana serta kesejahteraan guru diperhatikan.

Biaya Pendidikan Dasar

Orang tua murid dikenakan membayar iuran sekolah yang dibayarkan pada awal tahun ajaran baru. Besarnya iuran yang dipungut oleh pihak sekolah berkisar antara RM 50 hingga RM 75 pertahun (Rp. 125.000 – 187.500/tahun) tiap siswa. Iuran tersebut dirinci untuk pembayaran asuransi, biaya ujian tengah semester & semesteran, iuran khas, biaya LKS, praktek komputer, kartu ujian, file data siswa & rapor. Khusus untuk sumbangan PIBG (Persatuan Ibu Bapak dan Guru) hanya dipungut satu bayaran untuk satu keluarga. Jadi untuk keluarga yang menyekolahkan 1 anak atau lebih, dikenakan bayaran yang sama yaitu RM 25/keluarga. Dan untuk siswa kelas enam ditambah biaya UPSR sebesar RM 70. Selain itu tak ada pungutan lain, termasuk pula tak ada pungutan sumbangan dana pembangunan.

Pembangunan dan renovasi gedung sepenuhnya menjadi tanggungjawab kerajaan/pemerintah.

Buku teks atau buku pegangan yang digunakan siswa relatif tak berganti atau sama setiap tahun. Bila orang tua murid membeli semua buku teks dan aktifitas, harganya berkisar antara RM 80 – RM 125/siswa pertahun. Itupun hanya sekali beli untuk anak sulung saja. Karena untuk keluarga yang mempunyai anak lebih dari satu, buku teks tersebut dapat dipakai bergantian “turun temurun”. Khusus untuk keluarga dengan pendapatan kurang dari RM 2.000/bulan, dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk peminjaman buku teks yang disediakan dari sekolah.

Suatu biaya pendidikan yang terbilang relatif murah untuk negara dengan pendapatan rata-rata RM 2500/bulan atau setara dengan Rp. 6.250.000/bulan (*Data 2003, Kementerian Keuangan Malaysia*). Lebih-lebih lagi, mulai tahun persekolahan 2008 pemerintah meminjamkan semua buku teks kepada para siswa sekolah rendah tanpa kecuali. Praktis, orangtua murid tidak lagi terbebani untuk membeli buku teks. Pemerintah/Kerajaan Malaysia, betul-betul memenuhi janjinya. Mulai tahun ajaran 2008 ini, semua siswa Sekolah Rendah warga tempatan (warga Malaysia) mendapatkan peminjaman buku teks yang disediakan oleh Pemerintah melalui sekolah masing-masing.

Pendidikan Menengah

Sekolah menengah umum dapat dianggap sebagai kelanjutan sekolah rendah. Bahasa Malaysia digunakan sebagai bahasa pengantar bagi semua mata pelajaran selain Sains (Biologi, Fisika dan Kimia) dan Matematika (termasuk Matematika Tambahan). Para pelajar wajib menempuh pelajaran dari tingkat 1 hingga tingkat 5 (selama 5 tahun). Seperti di sekolah rendah, setiap tingkatan ditempuh selama satu tahun. Pada akhir tingkat tiga (setingkat kelas IX SMP di Indonesia) para pelajar akan mengikuti sejenis ujian nasional dengan nama Penilaian Menengah Rendah (PMR). Berdasarkan pencapaian PMR, mereka akan dikategorikan pada jurusan Sains atau jurusan Sastra.

Jurusan Sains banyak menjadi pilihan, karena pelajar dari jurusan Sains diperbolehkan untuk keluar dari jurusan Sains lalu mengikuti jurusan Sastra, tetapi sebaliknya tidak diperbolehkan. Pelajar-pelajar yang tidak mendapat nilai yang memuaskan dapat memilih untuk menjalani pengkhususan vokasional di sekolah teknik, semacam SMK di Indonesia.

Pada akhir tingkat lima, para pelajar harus mengikuti ujian berupa Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) sebelum menamatkan pelajaran di tingkat menengah. SPM adalah ujian berdasarkan standar School Certificate United Kingdom, yang kemudian menjadi ujian Tahap 'O' General Certificate of Education (GCE Tahap 'O'), kemudian berubah lagi menjadi GCSE (General Certificate of Secondary School).

Setelah menempuh SPM, atau dengan kata lain telah menyelesaikan Program Wajib Belajar sebelas tahun, pelajar dapat memilih untuk menempuh tingkat 6 atau mengikuti matrikulasi, keduanya ditempuh dalam waktu satu atau dua tahun. Jika mereka melanjutkan pelajaran dalam Tingkat Enam, mereka akan menempuh ujian yang disebut Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM). STPM biasanya ditempuh bagi mereka yang ingin belajar di universitas umum di Malaysia, STPM ini juga diakui pada tingkat internasional. Para pelajar juga dapat mengikuti program matrikulasi selama satu atau dua tahun. Sembilan puluh persen dari kuota matrikulasi adalah untuk bumiputera. Program matrikulasi tidak seketat dengan STPM. Kabarinya, program ini untuk memberi kemudahan bumiputera belajar di universitas. Program STPM dan matrikulasi ini merupakan program pra universitas.

Di samping jenis sekolah umum sebagaimana yang diuraikan di atas, sistem pendidikan Malaysia juga terdapat jenis pendidikan lain yaitu pendidikan agama, baik berupa Sekolah Rendah Agama (SRA) maupun Sekolah Menengah Agama (SMA). Di Malaysia Sekolah

Agama ini diurus oleh Jabatan Agama Islam suatu negara bagian.⁹ Di Indonesia, Sekolah Agama tersebut mirip dengan Madrasah Diniyah yang sebagian besar dikelola oleh pihak swasta. Sementara pendidikan seperti Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah maupun Aliyah tidak ada di sistem pendidikan Malaysia. Hanya baru-baru ini di beberapa negara bagian seperti Selangor melakukan inovasi pada Sekolah Agama tadi menjadi sekolah integrasi yang memadukan kurikulum sekolah umum dengan sekolah agama, mirip seperti madrasah yang dikelola Departemen Agama kita hanya menggunakan model *fullday school* sebagaimana Sekolah Islam Terpadu. Salah satu sekolah model seperti ini yang penulis kunjungi adalah Sekolah Rendah Agama Integrasi (SRAI) Tengku Ampuan Fatimah di Batu Belah Klang Selangor yang dibina oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Rupanya sebagaimana di Indonesia sekolah model ini banyak diminati masyarakat sehingga negara-negara bagian lain di Malaysia akan mendirikan sekolah semacam itu. Dalam hal ini Sekolah Islam Terpadu di Indonesia mereka jadikan salah satu model untuk ditiru. Hanya bedanya kalau *fullday school* di negara kita dikelola swasta tetapi di Malaysia akan dijadikan proyek pemerintah dalam hal ini Depag-nya Malaysia.

Sementara kalangan swasta Islam di Malaysia, telah terlebih dahulu mengembangkan sekolah terintegrasi tersebut dengan nama Sekolah Rendah Islam (SRI) dan Sekolah Menengah Islam (SMI), sebagai contoh yang sempat penulis kunjungi yaitu SRI SMI Al-Amin di Kemaman Terengganu, yang sekarang murid tertinggi sampai pada sekolah menengah tingkat empat, setingkat SMA kelas 1 atau kelas X. SRI dan SMI ini banyak kemiripan dengan Sekolah Islam Terpadu di Indonesia baik dalam kurikulum maupun dalam pembinaan siswanya. Sehingga kemudian memudahkan untuk menjalin silaturahmi dan melakukan sharing antara Sekolah Islam Terpadu di Indonesia dengan Sekolah Islam di Malaysia tersebut, dengan langkah konkritnya adalah terwujudnya sebuah lembaga pemberdaya Pendidikan Islam

Internasional dengan nama International Centre for Excellent Education (ICEE) yang bermarkas di Kuala Lumpur.

Setelah perang dunia II, saat Malaysia masih ditangan kekuasaan Inggris, pada tahun 1955 dibentuk satu komisi di bawah pimpinan A. Rezak yang isinya mempersiapkan usul-usul bagi sistem pendidikan Malaysia. Diantara usul tersebut ditetapkan bahwa bahasa Melayu dan Inggris dijadikan sebagai bahasa wajib bagi semua murid di sekolah, selain bahasa Tamil dan China.

Organisasi pendidikan di pusat terdiri atas menteri pendidikan. Kementerian yang dikepalai oleh sekretaris tetap pendidikan bertanggung jawab langsung untuk pendidikan sekolah menengah dan purna sekolah menengah, sekolah teknik dan pengawasan grant atau pemberian dana kepada negara-negara bagian. Kementerian pendidikan ini terdiri atas dua bagian. Bagian administrasi yang mengurus perencanaan keuangan, administrasi, personil dan pelajaran terpadu, dan pengawasan terhadap pelajaran agama Islam. Adapun bagian kedua berada dibawah pimpinan penasihat kepala bagian guru, bagian sekolah, sindikat ujian, pendidikan teknis, registrasi guru, serta perencanaan pendidikan dan penelitian. Kepala pendidikan di setiap negara bagian bertanggung jawab atas pengadministrasian sekolah rendah dan menengah di tingkat wilayah dan bertanggung jawab kepada kepala kementerian yang, yaitu sekretaris.

Pada tahun 1974, Malaysia membentuk jawatan kuasa kabinet yang bertugas mengkaji semua pelaksanaan pendidikan. Pada dekade 1990-an, Malaysia mengadakan perubahan kebijakan pendidikan secara berarti, diantaranya sebagai berikut:

1. Memperkenalkan pendidikan pra sekolah dalam sekolah rendah
2. Mengutamakan pendidikan teknologi dengan tujuan melahirkan pelajar yang mahir dalam bidang seni perusahan, perdagangan dan ekonomi

⁹ <http://majalahnh.com/index.php/cerita-islami/241.html?task=view>, 25 Oktober 2009

Adapun struktur pendidikan formal di semenanjung pada tahun 1960-an terbagi kepada lima peringkat, yaitu peringkat rendah selama 6 tahun, peringkat menengah rendah selama 3 tahun peringkat menengah atas selama 2 tahun, 2 tahun menengah tinggi dan 3 atau 6 tahun untuk pendidikan tinggi. Selanjutnya pendidikan akademik dan tekhnis selama 2 tahun. Lulus dari lembaga ini dapat mencari pekerjaan atau meneruskan pendidikan ke sekolah purna komprehensif selama 2 tahun lagi, yang terdiri atas dua kelompok, yaitu akademis dan kejuruan. Kelompok akademis dibagi dalam aliran-aliran kesenian, sains, pertanian, tekhnik, perdagangan dan kerumahtanggaan. Adapun kelompok kejuruan terdiri atas berbagai aliran dagang dan kejuruan. Pada akhir pendidikan mereka mengambil sertifikat, berarti mereka masuk ke jenjang pendidikan tinggi.

Di Malaysia terdapat beberapa perguruan tinggi, diantaranya Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Malaya, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), dan Universitas Islam International Malaysia (IIUM). Tiap universitas/institut memiliki fakultas dan sejumlah jurusan, baik berupa program diploma maupun sarjana.

Pada tahun 1957-1970 merupakan era penyusunan semula sistem pendidikan di Malaysia untuk mencapai matlamat membina masyarakat yang bersatu padu yang mempunyai identitas sendiri sebagai bangsa Malaysia. Sesuai dengan Rukun Negara dan Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang telah dirumuskan pada tanggal 13 Mei 1969. Adapun tujuan pendidikan di Malaysia adalah untuk melahirkan individu manusia atau rakyat Malaysia yang terdidik dalam pelbagai segi agar mereka matang berfikir, berkemahiran untuk memikul tanggungjawab dan mempunyai komitmen untuk mendukung aspirasi negara agar hasrat pembangunan masyarakat pada segi fisik, material dan spritual dapat dicapai sepenuhnya.¹⁰

Seiring dengan proklamasi Dasar Pendidikan Kebangsaan yang penegasan adalah satu sistem pendidikan yang mengutamakan bahasa kebangsaan atau bahasa Melayu sebagai media pengajaran dan pembelajaran bagi semua peringkat pendidikan dan dalam semua institusi. Rukun Negara (Malaysia) lahir tahun 1970. Arti lima prinsip atau tata cara; Kepercayaan kepada Tuhan, Kesetiaan kepada raja dan negara, Keluhuran perlembagaan, Kedaulatan undang-undang, Kesopanan dan Kesusilaan.¹¹

Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam Malaysia

Masuknya Islam ke Malaysia, merupakan awal perjalanan pendidikan Islam kedatangan para pedagang yang berperan sebagai da'i serta melakukan kontak personal yang berbentuk informal dapat digolongkan sebagai kegiatan pendidikan. Kontak informal tersebut tidak memerlukan tempat, jadwal, buku atau mata pelajaran tertentu. Namun setelah masyarakat muslim terbentuk baru muncul lembaga pendidikan non formal yang berpusat di masjid, rumah, dan istana. Masyarakat Melayu menyebutnya sekolah Qur'an. Anak yang lulus dapat melanjutkan ke Mesir atau Makkah dan sekembalinya ke tanah air, mereka membangun institusi pendidikan Islam, seperti pondok.¹²

Pendidikan Islam, khususnya yang berbentuk bukan formal, dipercayai telah berkembang bersama-sama dengan penyebaran agama Islam di negeri-negeri Semenanjung Tanah Melayu serta kepulauan Melayu. Pedagang-pedagang Arab dan India yang beragama Islam yang datang ke kawasan Asia Tenggara telah menyebarkan agama Islam dan merupakan pelopor yang telah memulakan usaha-usaha pendidikan bukan formal dengan cara membina sekolah-sekolah

¹¹ Yaakub Isa, *Almanak Pendidikan*, hlm. 255; *Akta Pendidikan 1996* (Akta 550).

¹² Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 56

¹⁰ *Ibid*, Sufean Hussin, hlm. 145

pondok di Perlis, Kedah, Melaka, Trengganu, Kelantan, dan Brunei pada kurun kelima belas telah turut mengembangkan agama Islam dan institusi-institusi pendidikan formal pengajian Islam di negeri-negeri jajahan takhluk kesultanan tersebut.

Perkembangan tersebut memberikan keyakinan kepada masyarakat Melayu bahwa kedudukan agama Islam sebagai agama resmi negara masih mantap dalam menghadapi sekolah Inggris yang sekuler. Akan tetapi karena kurikulum di madrasah-madrasah kurang memberi tumpuan kepada pengetahuan matematik, sains dan bahasa Inggris. Ada beberapa bentuk lembaga pendidikan Agama Islam seperti (*Sekolah Rendah Agama/SRA*) digunakan untuk sekolah dasar, *Sekolah Menengah Agama* (SMA) digunakan untuk sekolah-sekolah menengah).

Sekolah rendah agama, sebelum tahun 2005 hanya merupakan satu subjek sampingan yang kurang diberi perhatian karena hanya sekedar penekanan aspek-aspek input rohani dengan tanpa yang paling penting dalam kehidupan seseorang yang beragama Islam. Yaitu penekanan terhadap kemahiran membaca alquran dan asasnya seperti tulisan jawi. Sehingga banyak generasi yang buta aksara alqur'an. Bahasa arab sebagai bahasa komunikasi merupakan langkah awal bagi seseorang untuk membaca alquran. Selanjutnya melanjutkan pengajian diperingkat menengah di sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) yang mengkombinasikan kurikulum akademik yang ditetapkan oleh kementerian pelajaran untuk peringkat pengajian di sekolah menengah.

Berikut penerapan pendidikan Islam di Malaysia dapat dibagi kepada tiga bagian; Pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran, Pendidikan agama Islam sebagai lembaga dan Pendidikan agama Islam sebagai nilai.

a. Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran

Pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah di Malaysia secara formal dimulai dari awal tahun 1960 an, setelah kerajaan melaksanakan

undang-undang pendidikan, sehingga terbentuklah akta pelajaran pada tahun 1961. dalam akta ini dinyatakan bahwa pendidikan agama Islam hendaklah diberikan kepada murid-murid sejumlah 15 orang atau lebih dan wajib untuk diujikan. Selanjutnya untuk meningkatkan peranan pendidikan agama, dibentuklah sebuah lembaga penasihat penyelaras Pelajaran dan Pendidikan Agama, dengan tujuan meningkatkan mutu pelajaran dan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah agama supaya pelajar dapat menjadi guru agama atau pegawai agama, disamping mengkaji kemungkinan pelajar tersebut melanjutkan pelajaran tinggi di institusi pengajian tinggi baik dalam maupun luar negeri.

b. Pendidikan Agama Islam sebagai lembaga (institusi).

Ada beberapa lembaga pendidikan agama Islam di Malaysia, yaitu:

1. Sekolah Rendah 6 tahun

Sekolah Rendah 6 tahun dibagi kepada tiga macam yaitu: (1) Sekolah Rendah Kebangsaan, (2) Sekolah Rendah Tamil, Dan (3) Sekolah Rendah Cina.

Kedudukan agama Islam yang menduduki kekhasan di Malaysia merupakan agama persekutuan, harus diajarkan ada setiap lembaga pendidikan dari lembaga pendidikan rendah sampai tinggi. Pada sekolah rendah tekanannya adalah alqur'an dan jawi (mengetahui huruf-huruf arab) ditambah dengan akhlak, ibadah, akidah dan lain-lain. Sekolah Rendah Islam mengikuti kurikulum yang diprogramkan pemerintah sehingga siswa mengikuti ujian UPSR (ujian penilaian sekolah rendah), akan tetapi mereka juga memprogramkan pendidikan agama yang penekanannya pada fardhu'ain dan bahasa arab.

2. Sekolah Menengah

Sekolah Menengah di Malaysia, ada yang dikenal dengan sekolah menengah berasrama penuh, menampung pelajar yang berprestasi, untuk lembaga pendidikan Islam dinamakan dengan :

- SMKA (Sekolah Menengah Kebangsaan Agama), sekolah ini mengintegrasikan pelajaran agama dengan pelajaran umum. Anggaran pembiayaan ditanggung kementerian Pendidikan Malaysia dibawah tanggung jawab pemerintah pusat karena sekolah ini merupakan sekolah unggulan jika dibandingkan dengan Indonesia. Pelajaran agama pada tingkat rendah (kelas 1-3) diberikan pelajaran bahasa arab komunikasi, sedangkan pada tingkat atas (kelas 4-5) diajarkan bahasa arab tinggi dan bahasa komunikasi. SMKA kalau dibandingkan di Indonesia sama dengan Tsanawiyah, sedangkan SMKA atas sama dengan madrasah Aliyah. Sedangkan kurikulumnya mencontoh kurikulum Al-Azhar.
- Sekolah Menengah Agama Negeri, sekolah ini diasuh dan dibiayai oleh kerajaan negeri. Kurikulumnya sama dengan SMKA. Pelajarannya banyak merujuk pada kitab-kitab dari Mesir.
- Sekolah Menengah Agama Rakyat, sekolah ini lahir dari rakyat, dan mengikuti kurikulum pemerintah dalam ilmu pengetahuan umum. Dalam bidang pengetahuan agama, sekolah ini sangat mementingkan bahasa arab. SMAR awalnya hanya mengajarkan pengetahuan agama. Akan tetapi karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman, maka akhirnya dimasukkan pula pelajaran umum. Bagi pelajar yang ingin mengikuti ujian akhir tingkat menengah rendah (PMR) dapat mengambil STAM (Sijil Tinggi Agama Malaysia), sementara untuk kelas enam tingkat atas bisa mengambil STA (Sijil tinggi Agama) Kebijakan pemerintah menjadikan sekolah menengah agama rakyat menjadi sekolah menengah agama negeri.

Pendidikan agama Islam di sekolah menengah kebangsaan dibagi dua bagian, yaitu tingkat rendah dan atas. Pendidikan agama Islam di sekolah menengah tingkat rendah dilakukan enam kali dalam seminggu dengan pengaturan tiga kali waktu pelajaran tatap muka

terjadwal san satu kali untuk praktikum. Pada sekolah menengah atas, pelajaran agama Islam dilaksanakan empat kali seminggu dengan rincian tiga kali tatap muka dan satu kali praktikum Materinya meliputi Tilawah al-qur'an, hadis, akidah, ibadah, tamaddun Islam dan akhlak.

3. Pondok

Pengajian agama Islam biasanya diadakan di surau-surau dan masjid pada waktu malam dengan dihadiri oleh lelaki dan perempuan. Pengajaran diadakan malam hari karena guru dan jemaah kelas bekerja pada siang hari. Perkara yang diajarkan antara lain membaca al-Qur'an, tajwid, tafsir al-Qur'an, hadis, fiqh dan tauhid. Pengajaran agama di sekolah pondok, yang didirikan atas usaha alim ulama dan masyarakat setempat. Dimana sekolah tersebut berdekatan dengan rumah guru dan asrama para pelajar. Pelajar juga bekerja seperti bertani, menangkap ikan dan mencari kayu untuk membantu tuan guru menarai hidup mereka semua. Guru-guru terdiri dari imam dan haji yang kadangkala berketurunan Sayid dan Seikh.

Proses pembelajaran di sekolah pondok ialah hafalan, khususnya bagi mata pelajaran qur'an, fiqh dan tauhid. Bagi mata pelajaran Qur'an, para pelajar mengeja dan membaca berulang-berulang sehingga menghafal surah dalam al-Quran. Biasanya pelajar menamatkan pengajiannya di sekolah pondok apabila empat atau lima kali khatam. Penubuhan sekolah pondok adalah menyebarkan anak dan memperkokoh pegangan dan nilai-nilai Islam serta nilai konservatif budaya Melayu.

Pada abad kedelapan belas dan menjelang abad ke-19, Trengganu Kelantan dan Kedah merupakan negeri yang mempunyai banyak tokoh ulama yang telah mendirikan sekolah-sekolah pondok. Diantara tokoh ulama di Terengganu ialah syeikh Abdul Malik bin Abdullah, Syeikh Daud bin Abdullah al-fatani. Di Kelantan, tokoh tersohor bernama Tuk Selehor, Tuk Padang Jelapang dan lainnya.

Rata-rata masyarakat Melayu di Malaysia menyebutnya dengan istilah Sekolah Quran. Bentuk pendidikan tradisional ini pernah

diusulkan oleh Raffles kepada pihak penjajahan Inggris agar dirubah, dengan arti lain direformasi. Walaupun usulan itu pada mulanya telah ditolak oleh Inggris, namun pada awal abad ke-19 penjajahan telah memperkenalkan sistem pendidikan Barat bentuk formal. Maka lahirlah Penang Free School, Singapore Free School, Melaka Free School diikuti juga dengan pendirian cabang-cabangnya di wilayah Malaysia. Pemerintah Inggris juga membentuk sekolah Agama Madrasah. Penumbuhan sekolah tersebut telah menimbulkan situasi yang rumit, khususnya bagi proses pencapaian integrasi nasional, sekolah-sekolah yang berkualitas di bina hanya untuk anak-anak bangsawan Melayu saja.

Institusi itu tidak menarik minat orang Melayu kerana bertentangan dengan tradisi dan kebudayaan. Penubuhan sekolah-sekolah pendakwah kristian yang mempunyai orientasi kurikulum kebaratan dan sekuler, apalagi sistem yang diperkenalkan oleh penjajah mempunyai pengaruh ajaran Kristian yang merupakan ancaman kepada agama dan budaya hidup mereka. Akhirnya masyarakat Melayu melalui kaum muda lebih berpihak dan mempertahankan institusi tradisional mereka seperti yang telah diwarisi sejak lama. Iaitu pendidikan di rumah, masjid dan surau atau dengan kalimat lain Sekolah Quran dan mendirikan sekolah agama madrasah.¹³

Sejak tahun 1854 sekolah-sekolah Quran telah diambil alih kepengurusannya dengan dibiayai dan diberi bantuan penuh, tanpa merubah sistem yang ada, bedanya hanya lebih terorganisir dan kondusif. Lama-kelamaan gaya pendidikan telah mengalamii perubahan, mulai dari segi kurikulum hingga kepada jam belajar. Semenjak itulah lahirnya sekolah sesi pagi dan sesi petang di Malaysia. Guru akademik dibiayai kerajaan dan guru agama dibiayai oleh orang tua. Hal ini adalah berupa doktrin yang mencoba memisahkan antara ilmu agama dengan ilmu akademik. Sementara sekolah agama

madrasah mempunyai penyusunan dan organisasi yang lebih sistematis dari sekolah pondok/Quran, yaitu mempunyai ciri meja kursi yang lengkap, waktu belajar yang tetap, kurikulum yang terstruktur dan mempunyai bilik darjah. Madrasah yang pertama didirikan madrasah Al-Iqbal pada tahun 1907 di Singapura. Sekolah Al-Hadi di Melaka pada tahun 1917 dan madrasah Al-Mashor di Pulau Pinang pada tahun 1919 dan madrasah lainnya.

4. Pendidikan Tinggi

Pendidikan Tinggi Islam di Malaysia dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu universitas, Kolej Universitas dan Kolej. Islamic studies di tingkat pendidikan tinggi telah dimulai pada tahun 1950-an di Universitas Malaya (UM). UM merupakan universitas tertua di Malaysia. Sedangkan pendidikan tinggi Islam dalam bentuk kolej telah dimulai pada tahun 1955 pada saat didirikannya Malaysian Muslim College (MMC) yang outputnya sampai diploma. Sementara lembaga pendidikan tinggi Islam, ada juga yang berbentuk Institut.

Selain itu terdapat Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) dan Universitas Islam Internasional Malaysia (Internasional Islamic University /IIU Malaysia) yang didirikan terinspirasi oleh konferensi pertama se-dunia tentang pendidikan Islam tahun 1977 di Makkah. IIU ini berjuang untuk menguatkan moral dan intelektual umat Islam dan bagi pembentukan keutamaan Islam bagi semua perilaku manusia.

Posisi Pendidikan Islam dalam Kebijakan Pemerintah Malaysia

Pada tahun 1975, berbagai langkah penting untuk memperkuat pendidikan Islam di negara ini telah ditempuh oleh Departemen pendidikan. Dengan mengadakan mata pelajaran Agama Islam di dalam kurikulum sekolah adalah selaras dengan kedudukan agama Islam sebagai agama resmi negara. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berkesinambungan ke arah pengembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersatu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan

¹³ Sufean Hussin, *Pendidikan di Malaysia: Sejarah, Sistem dan Falsafah*, (Selangor: Dewan bahasa dan pustaka, 1993), hlm. 11

jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan upaya mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonisan dan kemakmuran masyarakat dan negara.

Pada tahun 1982, Perdana menteri Mahathir Muhammad mengambil keputusan untuk menjalankan kebijakan penanaman nilai-nilai Islam di pemerintahan. Dengan demikian peran Islam kian penting. Setahun kemudian, pada tahun 1983 Departemen Pendidikan menyatakan bahwa nilai-nilai moral akan diajarkan kepada pelajar non muslim, sementara ilmu pengetahuan agama akan diajarkan kepada para pelajar muslim.¹⁴

Perkembangan masjid dan surau di Malaysia mencerminkan semaraknya aktivitas umat Islam. Bandar Bangi Baru (sekitar 25 km dari Kuala Lumpur), misalnya merupakan daerah yang memiliki masjid dan surau dengan perkembangan pesat. Seiring dengan makin luasnya pemukiman dan pertokoan serta industrialisasi, jumlah masjid juga meningkat. Masjid bukan saja untuk melaksanakan praktek ibadah salat, melainkan juga sebagai lembaga pendidikan Islam. Surau An-Nur di Bandar Baru Bangi, misalnya merupakan tempat kajian al-Qur'an dan tafsir, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kadangkala dilakukan tahlil serta perbincangan keagamaan terjadwal secara sistematis tentang segala hal yang berkaitan dengan spiritual dan problem yang dihadapi masyarakat masa kini.

Pada prinsipnya urusan agama Islam menjadi wewenang pemerintah negara bagian. Seperti yang ditetapkan oleh konstitusi Malaysia, sultan menjadi pimpinan agama Islam di negaranya masing-masing. Namun demikian, agaknya pemerintah merasa perlu untuk memandu, kalau tidak ingin dikatakan mengatur, agar aktivitas Islam di negara tersebut tidak menjadi sumber instabilitas sehingga pemerintah mengatur berbagai aktivitas Islam berdasarkan kepada

kebijakan pemerintah. Maka pemerintah mendirikan sejumlah institusi Islam seperti IIUM (International Islamic University Malaysia) dan Bank Islam dan mengembangkan lembaga-lembaga yang sudah ada untuk kemudian mengkoordinir dan mengatur berbagai aktivitas Islam. Dikatakan bahwa peran serta Anwar Ibrahim dalam pemerintahan, selain makin mempertinggi komitmen pemerintah terhadap Islam serta penolong dalam membuka jalan bagi terciptanya berbagai kebijakan Islam.¹⁵

Sejumlah institusi dimaksud diantaranya adalah BAHEIS (Bahagian Hal Ehwal Islam) atau yang lebih dikenal dengan jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), pusat penelitian Islam, Institut Dakwah dan Institut al-Qur'an. Di antara program yang dilaksanakan BAHEIS adalah takmir masjid dan pendidikan Islam.¹⁶ Salah satu kontribusi terbesar BAHEIS lainnya yang patut dicatat adalah perannya sebagai agen pemerintah dalam mengkampanyekan dan mensosialisasikan kebijakan penerapan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan yang dilancarkan tahun 1982. Yang mendasarinya adalah bahwa pembangunan dan kejayaan sebuah negara antara lain tergantung pada nilai-nilai hidup dan etika kerja yang positif di kalangan pekerja-pekerjanya. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam seperti bersih, cakap dan amanah harus ditanamkan dalam jiwa semua pegawai pemerintah dan rakyat. Secara khusus nilai-nilai yang ingin ditanamkan antara lain mempunyai moral yang tinggi, tertib dan disiplin, tidak menyeleweng dan tidak korupsi, adil serta tidak mementingkan diri sendiri.¹⁷

¹⁵ Judith Nagata, *The Reflowering of Malaysian Islam*, hlm. 159

¹⁶ Berkaitan dengan pendidikan Islam, BAHEIS telah pula mendirikan apa yang disebut dengan kelas *fardhu Ain* sebagai pelengkap pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah. Program yang dijalankan sejak 1990 itu dimaksudkan agar anak-anak muslim menguasai pokok-pokok agama Islam (asas fardhu ain) dengan baik dan mampu membaca al-Qur'an sebelum melanjutkan ke sekolah menengah.

¹⁷ Untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut, BAHEIS membentuk badan pemandu yang antara lain dianggotai oleh pegawai-pegawai tinggi pemerintahan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 120

Uraian diatas selain menggambarkan bahwa pemerintah melalui UMNO ingin menunjukkan perannya dalam mendukung Islam dan juga menggambarkan bahwa betapa pemerintah berupaya memasukkan kegiatan-kegiatan Islam ke dalam pengaturan dan pengendaliannya. Sebagai upaya untuk menunjukkan keseriusannya dalam merespon penegasan kembali Islam, pemerintah menyediakan sejumlah infrastruktur yang diperlukan guna membantu umat Islam dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama mereka. Realisasi paling umum dari keseriusan ini adalah pembangunan sejumlah masjid untuk memenuhi kebutuhan komunitas muslim. Di bidang pendidikan misalnya, pemerintah telah membangun Sekolah Guru Islam (Islamic teachers' College), yang menghabiskan biaya senilai M\$ 22 Juta. Pemerintah juga menyalurkan dana M\$ 22 juta untuk pelaksanaan pelatihan guru-guru Agama dan membentuk Yayasan Dakwah Islamiyah serta pembangunan IIUM yang menelan biaya sekitar M\$ 500 juta.

Kebijakan dan program keislaman di bidang pendidikan terlihat lebih awal mendapatkan perhatian daripada bidang lainnya. Hal ini terjadi karena posisi Menteri Pendidikan saat itu dipegang oleh Mahathir Muhammad, sosok yang banyak memberikan kontribusi bagi upaya islamisasi di Malaysia pada tahun 1974. Beliau mengadakan pengkajian kembali tentang pendidikan agama Islam dan sistem pengajarannya serta membentuk dewan penasehat untuk pendidikan agama Islam. Pembentukan itu dimaksud agar Islam menjadi relevan dengan kebutuhan modernisasi masyarakat muslim Malaysia.¹⁸

Pada tahun 1979, pengetahuan agama Islam ditetapkan sebagai materi ujian di tingkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Setahun kemudian, pemerintah mendirikan yang pertama kali Maktab

Perguruan Islam (Islamic Teachers' College). Dari lembaga ini murid yang berpotensi akan dikirim ke Mesir, Pakistan, dan Indonesia untuk melanjutkan studi mereka.

Pemerintah melalui DEB (Dasar Ekonomi Baru), pemerintah memberi kesempatan lebih luas kepada penduduk melayu guna melanjutkan studi mereka, khususnya untuk belajar sains dan teknologi di berbagai universitas baik dalam maupun luar negeri. Perlu diingatkan kembali, ketika masa penjajahan kolonial Inggris, komunitas melayu mengalami keterbelakangan, dimana anak petani Melayu dibiarkan tetap belajar di sekolah-sekolah Islam dalam suatu latar pedesaan dengan fasilitas yang sangat terbatas dan didorong untuk menguasai pendidikan Islam yang pokok dan dasar terutama belajar menghafal dan mengingat ayat-ayat alqur'an.. Sedangkan kaum elit (cina) memperoleh pendidikan melalui sekolah-sekolah Inggris diberi fasilitas yang lebih memadai. Hanya sedikit sekali dari kalangan anak-anak petani awam yang memperoleh kesempatan belajar di sekolah Inggris (sekuler) dengan materi-materi pendidikan sekuler dalam bahasa Inggris sampai ke tingkat yang tertinggi.¹⁹

Selain memberikan beasiswa kepada mahasiswa untuk belajar, upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di dalam negeri juga tampak jelas. Upaya tersebut seperti dilakukan Divisi Pendidikan Agama, suatu departemen di kementerian Pendidikan yang terbentuk pada tahun 1972, yang mengelola semua aspek pendidikan Islam di sekolah-sekolah telah mencatat kemajuan dalam berbagai kemajuan dalam mempromosikan pengajaran Islam dan bahasa Arab, penataran guru agama di Akademii Pengajaran Agama, perbaikan dan revisi kurikulum, organisasi dakwah melakukan perlombaan membaca alqur'an tiap tahun di sekolah-sekolah dan pengelolaan 13 sekolah

¹⁹ Winzeler, Tradisional Islamic School in Kelantan, dalam *Journal of the Malayan of the Royal Asiatic Society*, Vol 48, no.2, 1975. Lihat juga Moshe Yegar, *Islam and Islamic Institutions in British Malaya 1874-1941: Policies and Implementation*, (Jerusalem: Hebrew University, 1976), hlm. 224

dengan mengadakan berbagai kegiatan seperti seminar, kursus dan ceramah berkaitan dengan kebijakan tersebut yang ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dan pegawai di berbagai instansi pemerintahan dan swasta. Lihat, *Malaysia*, hlm. 351, dan Hasim Abdullah, dkk., *Perspektif Islam di Malaysia*, hlm. 80

¹⁸ Husein Mutalib, *Islam and Ethnicity in Malay Politics*, hlm. 135

dasar agama yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah negara bagian.²⁰ Kemudian upaya pemerintah mengalihkan Pendidikan Tinggi Muslim Malaysia menjadi Fakultas Studi-studi Islam di Universitas Nasional Malaysia dan mendirikan Universitas Islam International (UII). Kesemuanya merupakan pertanda bahwa ada keterkaitan antara identitas kemelayuan dan keislaman mereka.

Pengembangan sumber daya manusia merupakan aspek terpenting dalam meningkatkan kualitas masyarakat. Hal ini disadari betul oleh pemerintah Malaysia. Terlihat dengan adanya kementerian khusus yang menanganinya yaitu Kementerian Pengembangan Pedesaan dan Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat yang berfungsi seperti halnya Menteri Koordinator Kesra di Indonesia. Dengan masalah pengembangan kualitas sumber daya manusia, ada organisasi khusus yang menanganinya yaitu KEMAS (Kemajuan Masyarakat) yang bentuknya menyerupai LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa). Lembaga ini dibawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Di Indonesia, LKMD yang seharusnya berperan sebagai pusat pengembangan DM ternyata masih sarat dengan masalah birokrasi dan fungsi politis semata, belum dapat berperan secara operasional seperti halnya KEMAS.

Di Malaysia jarang sekali terdengar aksi protes guru-guru yang berstatus pegawai kerajaan menyangkut aspek kesejahteraan. Ini bisa dipahami. Dengan gaji RM 2 ribu perbulan bagi guru yang baru diangkat yang biasanya masih berstatus lajang. Tentu mereka tak terlalu dipusingkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apalagi guru senior. Di luar jabatan strukturalnya sebagai wakil kepala sekolah, rata-rata guru-guru berpengalaman di Malaysia digaji kerajaan sekitar RM 9 ribu alias sekitar 23 juta rupiah perbulan.

Di luar pendapatan rutin bulanan itu, pihak kerajaan masih memberi sokongan dan berbagai kemudahan bagi guru untuk menaikkan status sosial mereka. Pinjaman pembelian rumah dan kendaraan (baca: mobil), tentu saja dengan bunga yang amat rendah, bisa diperoleh guru setelah mengabdikan diri dalam rentang waktu tertentu kepada kerajaan. Penghargaan masyarakat kepada guru (warga setempat menyebutnya Cekgu) juga cukup tinggi sehingga status sosial guru dalam kehidupan sehari-hari mendapat tempat terhormat.

Iklim yang demikian tentu amat mendukung lahirnya guru-guru yang profesional. Tanpa harus digembar-gemborkan pejabat yang berwenang, sebagaimana sering terdengar di negeri ini, profesionalitas di kalangan guru datang dengan sendirinya setelah kebutuhan dan penghargaan terhadap mereka diberikan pihak kerajaan dan stakeholders pendidikan.

Di Kota Kuching sebagai pusat pemerintahan Negara Bagian Sarawak misalnya, tak terdengar berita ada guru yang telah digaji kerajaan, mengajar di lebih dari satu sekolah. Dengan begitu, perhatian mereka pada tugas dan tanggung jawab sebagai guru menjadi lebih terfokus. Lebih dari itu, kesempatan mereka untuk bisa mengembangkan diri agar memiliki tampilan dan sosok sebagai pendidik sejati terbuka lebar. Setiap ada perkembangan baru, taruhlah seperti ada kurikulum baru, guru-guru di Sarawak diantar berkursus. Seluruh biaya untuk aktiviti itu ditanggung oleh kerajaan.

Ujung dari semua itu bisa dipahami bila kualitas pendidikan di negeri ini terus merangkak naik. Seiring dengan itu, kualitas sumber daya manusia di kalangan anak-anak negeri pun dengan sendirinya ikut terdongkrak, yang kemudian berimplikasi pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat umumnya. Pergerakan itu tercermin dari peringkat HDI Malaysia yang kini masuk dalam deretan negara-negara berkembang paling progresif, meninggalkan Indonesia!

Pada era 1960-an hingga 1970-an, Pemerintah Malaysia banyak mengirim pelajar-pelajarnya ke lembaga pendidikan bergengsi di luar

²⁰ M. Kamal Hasan, Beberapa Dimensi Pendidikan Islam di Asia Tenggara, dalam Taufiq Abdullah dan Sharon Siddique(ed), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta, LP3ES, 1988), hlm. 427

negeri, seperti Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Umumnya, sepulang dari belajar di luar negeri, mereka inilah yang kemudian menjadi pimpinan di banyak lembaga pemerintahan di negeri ini. Disokong mereka yang menamatkan pendidikan di dalam negeri, termasuk mantan Perdana Menteri Mahatir Mohammad yang menyelesaikan pendidikan di Singapura, bidang pendidikan menjadi perhatian.

Pada saat bersamaan, pada tahun 1970-an itu berdatangan para sukarelawan dari Australia, Inggris, Selandia Baru, dan Amerika Serikat ke kawasan Semenanjung Malaya serta Sabah dan Sarawak. Mereka bergerak di berbagai bidang kehidupan, termasuk di ikut terlibat dalam bidang pendidikan. Secara tidak langsung kehadiran para sukarelawan dari luar negeri ini ikut meningkatkan taraf pendidikan Malaysia. Bahkan, beberapa di antara para sukarelawan itu ada yang akhirnya tetap tinggal di Malaysia, Namun, sudah diketahui luas, di era 1970-an itu cukup banyak guru-guru dari Indonesia diminta Pemerintah Kerajaan Malaysia untuk mengajar di negeri jiran itu.

Kini, setelah hampir 30 tahun lebih berlalu, Malaysia berhasil menuai buah dari usaha yang mereka tanam. Tantangan pendidikan yang mereka hadapi tidak lagi menyangkut hal-hal mendasar, seperti ambruknya gedung-gedung sekolah dan tingkat kesejahteraan guru, tetapi pada berbagai input lain dari pendidikan sebagai sebuah proses. Taruhlah seperti upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga pengajar yang tidak boleh berhenti pada satu titik. Sebaliknya, kemampuan-kemampuan itu tetap dan selalu harus terus diasah, seiring dengan kemajuan pesat yang berkembang di luar ruang kelas.

Berkat konsistensi antara keinginan dan sikap Pemerintah Kerajaan Malaysia akan pentingnya dunia pendidikan bagi kemajuan bangsa, seperti telah mereka buktikan antara lain lewat penyediaan anggaran yang cukup signifikan (hingga 23 persen dari total anggaran negara) untuk bidang ini, institusi pendidikan di negeri ini telah

menjadi pusat tolehan bagi berbagai kepentingan. Banyak orang percaya, keberhasilan Malaysia bangkit begitu cepat dari keterpurukan akibat pengaruh ekonomi global beberapa tahun lalu, salah satunya berkat andil besar dunia pendidikan yang mampu menghasilkan manusia-manusia berkualitas dan mandiri.

Peran Pemerintah

Kurikulum pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, relatif stabil. Kurikulum yang digunakan di Sekolah Rendah Malaysia disebut dengan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). Dari data Kementerian Pelajaran Malaysia, KBSR mulai diujicobakan tahun 1982 di 302 buah sekolah rendah. Sejak tahun 1988, pelaksanaan KBSR sepenuhnya dicapai dan hingga tahun 2007 ini masih dipergunakan.

Penulis tidak menemukan data resmi yang menjelaskan tentang perubahan kurikulum dari KBSR menjadi kurikulum lainnya. Selain dalam buku teks untuk sekolah rendah tahun 2007 tertulis: disusun berdasarkan KBSR yang disemak-ulang/direvisi. Revisi terakhir dilakukan pada tahun 2005, dimana mata pelajaran Sains dan Matematika menggunakan bahasa pengantar Bahasa Inggris.

Gaji guru di Malaysia berkisar di atas RM 1000 (>Rp 2.500.000), yang hampir setara dengan gaji profesor (golongan IV/e) di negara kita. Meskipun juga banyak keluhan dari para guru Malaysia tersebut yang merasa gaji mereka masih juga rendah. Namun pada kenyataannya, guru sekolah rendah di Malaysia sudah mampu mengajukan kredit mobil dari gajinya, sedangkan guru SD di Indonesia baru pada tahap layak mengajukan kredit sepeda motor. Itupun baru sebagian kecil guru saja, sedang sebagian besar lainnya berusaha melunasinya dengan menjadi tukang ojek.

Di Malaysia, ketika sebuah keluarga memiliki seorang anak maka orang tuanya wajib mendaftarkannya di sekolah rendah (Indonesia=SD) satu tahun sebelum masa sekolah. Hal ini

dimaksudkan agar adanya kepastian bahwa anaknya mengikut pendidikan wajib. Di Malaysia masa persekolahan sekolah rendah adalah 7-12 tahun. Jadi saat seorang anak sudah berumur 6 tahun, jika orang tua belum mendaftarkannya ke sekolah rendah maka akan dikenakan sanksi undang-undang. Orang tua akan dikenakan denda max RM 5000 atau kurungan penjara max 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Yang tak kalah bernilai “plus” juga adalah mengenai uang bayaran sekolah rendah di Malaysia. Tidak seperti di Indonesia yang banyak pungutan-pungutan sekolah, di Malaysia sumbangan PIBG (Persatuan Ibu Bapa dan Guru) hanya dibayar perkeluarga. Jadi kalau sebuah keluarga memiliki 1 anak atau lebih sama saja bayaran yang dikeluarkan. Selain itu pungutan lain tidak ada termasuk sumbangan untuk dana pembangunan. Sebab dana pembangunan sepenuhnya merupakan tanggungjawab pemerintah.

Semua itu akan amat tergantung dari metoda pengajaran yang diterapkan dan bagaimana semuanya itu dilaksanakan dalam praktik sehari-hari. Pelaksananya amat tergantung dari Kebijakan Pendidikan, Birokrasi Pendidikan, Pengawasan Pendidikan dan Anggaran Pendidikan. Malaysia adalah salah satu negara ASEAN yang cukup menonjol dalam usaha mengembangkan sumberdaya manusianya. Bahkan menginjak millenium kedua, negara jiran itu ingin meniru Inggris yang menjadikan pendidikan sebagai komoditi layak jual. Kiat-kiat negara multietnis itu dalam bidang pendidikan.

Pada masa-masa pra kemerdekaan, model-model pendidikan dasar dan menengah di Malaysia terbentuk berdasarkan ras, yaitu Melayu, Cina, dan India, serta satu model pendidikan untuk semua ras. Sekolah Melayu khusus untuk ras Melayu dan gratis. Sekolah untuk semua ras disubsidi pemerintah. Sedangkan sekolah India dan Cina swasta penuh. Saat masih dijajah Inggris, standar pendidikan di Malaysia mengikuti sekolah-sekolah di Inggris. Namun sesudah merdeka, persoalan menjadi semakin kompleks. Langkah pertama yang dilakukan adalah nasionalisasi sekolah-sekolah swasta yang berdasarkan ras itu. Masalah utama yang dihadapi adalah minimnya

sumberdaya manusia (SDM). Selain itu, karena masyarakat yang multirasial, bahasa Melayu belum menjadi bahasa resmi negara.

Langkah pertama yang dilakukan Malaysia adalah mencetak guru sebanyak-banyaknya untuk semua jenjang sekolah, dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar untuk semua jenjang pendidikan. Untuk mencetak guru, khususnya guru sekolah menengah, diperlukan pendidikan guru di tingkat perguruan tinggi. Tapi masalahnya, pada tahun 1959, negara itu hanya mempunyai satu perguruan tinggi. Untuk mengatasi itu Departemen Pendidikan mendirikan kolej-kolej untuk pembibitan guru (*Teacher Training Colleges*). Kolej-kolej inilah yang menyediakan pendidikan calon guru (*pre-service training*) dan pendidikan guru (*in-service training*) sekolah rendah dan menengah. Dalam kurun waktu relatif singkat, tepatnya pada tahun 1974, Malaysia telah mempunyai 14 kolej dengan jumlah peserta seluruhnya 5.524 mahasiswa. Suatu jumlah yang cukup banyak waktu itu.

Training guru-guru tingkat menengah akhirnya dilaksanakan di Fakultas Pendidikan Universitas Malaya. Sekaligus untuk program diploma, BA, MA dan doktor bagi yang berminat. Dengan membuat kolej-kolej itu, pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan bahwa untuk mengajar di sekolah dan lembaga pendidikan tingkat apapun, seseorang haruslah guru terdaftar, atau memiliki ijin sementara mengajar, atau mahasiswa keluaran *Teacher Training College*. Selain itu juga terdapat training untuk guru-guru pembina mata pelajaran di sekolah-sekolah. Khususnya untuk guru-guru mata pelajaran matematika, sains, bahasa Melayu, pendidikan kesenian, pendidikan jasmani, dan pengembangan kurikulum. Karena terbatasnya *Teacher Training College* maka kementerian-kementerian diberi tugas untuk melaksanakan training guru-guru.

Untuk mengatasi miskinnya penguasaan bahasa Melayu dikalangan warga negara Malaysia, pada tahun 1961 pemerintah mengeluarkan peraturan agar bahasa Melayu digunakan menjadi

bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Tapi, aturan ini perlahan-lahan baru dilaksanakan pada tahun 1968. Targetnya, tahun 1972 untuk semua sekolah dasar, 1982 untuk sekolah menengah, dan tahun 1983 untuk semua perguruan tinggi. Maka tidak heran jika pada tahun 60-an guru-guru sekolah menengah di Malaysia banyak yang didatangkan dari Indonesia. Posisinya, karena bahasa nasional belum ada, maka medium komunikasi antar-ras adalah bahasa Inggris. Inilah sebabnya penguasaan bahasa Inggris orang Malaysia rata-rata di atas orang Indonesia. Tapi tidak perlu heran jika hingga kini tidak semua orang Malaysia (khususnya India dan Cina) bisa berbahasa Melayu dengan baik dan benar.

Kebijakan pemerintah yang cukup berani adalah menerapkan strategi *Universal Free Primary Education*, yaitu wajib belajar untuk sekolah dasar atau pendidikan gratis untuk semua warga negara Malaysia. Kebijakan ini dianggap berani karena di Indonesia saja hal ini baru dicanangkan pada tahun 1994. Jika di Indonesia kebijakan pendidikan gratis ini terlaksana setelah 50 tahun merdeka, di Malaysia pendidikan gratis sejak tahun 1962, yaitu saat negara itu baru berumur 5 tahun. Kebijakan “berani” lain yang dilakukan Pemerintah Malaysia di bidang pendidikan adalah pemberian beasiswa untuk belajar di dalam ataupun di luar negeri. Policy pendidikan nasional Malaysia adalah bahwa tidak ada satupun laki-laki atau perempuan warga negara Malaysia yang terhalang meneruskan pendidikan tingkat tinggi, baik di kolej maupun di universitas, di dalam maupun di luar negeri, karena kekurangan dana. Untuk melaksanakan *policy* ini pemerintah Malaysia melalui Kementerian Pendidikan memanfaatkan beberapa sumber dana. Pada mulanya sumbernya dari *Commonwealth and Colombo Plan Countries*, Yayasan Tengku Abdul Rahman, dan Kementerian Pendidikan sendiri.

Beasiswa yang ditawarkan Kementerian Pendidikan termasuk bidang-bidang seni, sains, pertanian, dan ekonomi. Selain itu juga bidang teknik pelatihan guru-guru, pelatihan guru teknik, dan teknologi pertanian. Beasiswa *Commonwealth and Colombo Plan* bisa

untuk semua bidang di tingkat magister (S2), dan post-professional training, serta bisa ditempuh di Inggris, Kanada, India, Australia, dan negara-negara Commonwealth lainnya. Sedangkan beasiswa dari Yayasan Tengku Abdul Rahman diberikan dalam bentuk pinjaman (loan) untuk tingkat S1 dan S2. Artinya setelah mahasiswa tamat kuliah diharapkan dapat mengembalikan dana yang telah digunakan. Selain itu masih ada sumber beasiswa lain seperti *Commonwealth Education Study Fellow, Colombo Plan Scholarship, Shell Scholarship*, Bank Negara Scholarship, dsb. Bahkan beasiswa model Yayasan Tengku Abdul Rahman itu kini dilanjutkan oleh Pemerintah Malaysia, dan negeri-negeri bagian secara efektif. Dengan kebijakan ini maka jumlah mahasiswa Malaysia yang belajar di luar negeri bertambah dari tahun ke tahun, dan sudah tentu SDM berkualitas di negara itu makin bertambah. Pada tahun 1971 misalnya, mahasiswa Malaysia yang belajar di Inggris berjumlah 6.900 orang. Tahun 1972 jumlah itu meningkat menjadi 7.100 orang. Demikian pula jumlah mahasiswa di negara-negara Amerika, Australia, New Zealand, dan lain-lain.

Dengan strategi pemberian beasiswa atau pinjaman ini, kesempatan warga negara Malaysia untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya terbuka lebar. Pemerintah Malaysia dengan begitu dapat mengatasi problem SDM-nya. Jika saat merdeka Malaysia hanya memiliki satu universitas, maka tak lebih dari dua dekade, yakni tahun 1974, ia telah memiliki lima universitas besar. Kini, tahun 2005, jumlah universitas dan kolej di seluruh Malaysia lebih dari 50. Selain keberanian mengirimkan warganya belajar ke negara-negara maju, Malaysia juga tidak segan-segan menyewa tenaga-tenaga asing dalam berbagai bidang. Salah satu contohnya adalah ketika Malaysia mendirikan *International Islamic University Malaysia* (IIUM) dan *International Islamic Institute of Islamic Thought and Civilization* (ISTAC) pada akhir tahun 80-an.

Pada awal IIUM berdiri, dosen-dosen bidang studi Islam asal Malaysia masih belum banyak, sehingga terpaksa mengontrak dosen-dosen dari negara-negara Timur Tengah, Turki, Pakistan, India,

Sudan, Yaman, dsb. Saat itu jumlah dosen asing hampir mencapai 70%. Universitas ini sebenarnya adalah proyek ambisius Malaysia untuk pengembangan SDM bagi dunia Islam. Sehingga pada zaman Anwar Ibrahim, IIUM memberi beasiswa (baik dalam bentuk grant ataupun loan) kepada seluruh mahasiswanya. Hal ini dimaksudkan untuk menarik minat mahasiswa dari negara-negara Islam. Beasiswa diambilkan dari pajak perusahaan swasta maupun BUMN dan dari muhsinin di negara-negara Timur Tengah.

Model yang sama juga dilakukan oleh Prof Syed Naquib al-Attas di ISTAC. Al-Attas, cendekiawan Malaysia, malah berani mengontrak dosen-dosen yang berkualitas kelas dunia dengan bayaran tinggi. Untuk dosen bahasa Arab, ia merekrut Profesor Hasan Nagar, dosen bahasa Arab di Universitas Chicago, AS. Sedangkan untuk mengajar filsafat Islam, ia mengontrak Profesor Alparslan Acikgenc, dosen *Middle East Technical University* (METU) Turki. Untuk mengajar ilmu kedokteran Islam, ia menyewa Prof Sami Hamarneh, satu-satunya pakar kedokteran Islam di dunia. Untuk mengajar ilmu psikologi Islam ia merekrut Prof Malik Badri, pakar psikologi Islam tingkat dunia. Bahkan orientalis kelas dunia seperti Hans Daiber, Paul Lettink dan lain-lain pernah mengajar di sini. Namun pada saat yang sama al-Attas juga menyiapkan kader-kader calon pengganti dosen-dosen luar yang hanya dikontrak sementara itu. Selain dosen berkualitas, perpustakaan diisi dengan buku-buku yang lengkap dan berkualitas. Selain memiliki buku lengkap tentang kajian Timur dan Barat, ISTAC juga memiliki koleksi manuskrip yang cukup banyak. Koleksi manuskrip Mingana Collection yang termasuk terlengkap di Inggris kebanyakan telah dikopi ISTAC. Demikian pula koleksi manuskrip di Bosnia. Hans Daiber, orientalis kawakan dari Jerman, mengakui bahwa perpustakaan Fakultas Oriental Studies di Frankfurt masih kalah lengkap dibanding perpustakaan ISTAC.

Dengan berdirinya International Islamic University Malaysia (IIUM) ini, kualitas universitas-universitas negeri di Malaysia ikut berkembang pula. Mereka antara lain Universitas Malaya, Universtias

Kebangsaan Malaysia, Universitas Sains Malaysia, Universitas Putera Malaysia, Universitas Tun Abdu Razak, dan Universitas Teknologi Malaysia. Jika pada tahun 1970-an jumlah mahasiswa Malaysia di Indonesia mencapai 1.000 orang kini jumlah mahasiswa Indonesia di negeri jiran itu mencapai 5.000 orang lebih. Ini semua menunjukkan, pembangunan SDM di negeri jiran ini ditangani secara serius dan di sinilah sejatinya kekuatan negara ini.

Kesimpulan

Sistem pendidikan di Malaysia merupakan “warisan” sistem pendidikan Inggris. Pendidikan Malaysia, sebagaimana di Indonesia juga berupa sekolah negeri dan sekolah swasta. Pendidikan di Malaysia dikelola oleh pejabat kementerian. Sebagaimana di Indonesia, pendidikan Malaysia terdiri dari beberapa tingkat yaitu : Prasekolah, Pendidikan rendah, Pendidikan menengah dan Pengajian tinggi. Pemerintah Kerajaan Malaysia mewajibkan belajar untuk warganya selama 11 tahun yaitu untuk pendidikan rendah selama enam tahun dan pendidikan menengah selama lima tahun. Sejak tahun 2003, Malaysia menerapkan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam mata pelajaran yang berkenaan dengan Sains.

Bibliografi

- Assegaf, Abdul Rahman, *Internasionalisasi Pendidikan: Sketsa perbandingan Pendidikan di Negara Islam dan Barat*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003).
- Azmi, Wan Hussein, Islam di Malaysia: Kedatangan dan perkembangan (abad 7-20 M), dalam Azizan bin Abdul Razak, *Tamadun Islam di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia, 1980).
- Esposito, Jhons L., dan Fred R Von der Mehden, *Islamic Resurgence in Malaysia*, Dalam Jhon l.Esposito (ed), *Islam and Development*

Religion and Socio-political Change, (Syracuse: Syracuse University Press, 1980).

Fatimi, S.Q., *Islam Come to Malaysia*, (Singapore: Sociology Research Institute, 1963).

Hasan, M. Kamal, Beberapa Dimensi Pendidikan Islam di Asia Tenggara, dalam Taufiq Abdullah dan Sharon Siddique(ed), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES, 1988).

Hussin, Sufean, *Pendidikan di Malaysai: Sejarah, Sistem dan Falsafah*, (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993).

Suffian, Mohammed, Lee, H.P., and Trindade, F.A., (ed) *The Constitution of Malaysia, Its Development: 1957-1977*, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978).

Tobeng, Mansor, 'Keramat Tok Serban Hijau di Tanjung Inggeris, Kedah', *Mastika*, Oktober 1965

Winzeler, Tradisional Islamic School in Kelantan, dalam *Journal of the Malayan of the Royal Asiatic Society*, Vol 48, no.2, 1975.

Yegar, Moshe, *Islam and Islamic Institutions in British Malaya 1874-1941: Politics and Implementation*, (Jerusalem: Hebrew University, 1976).